

POLA JARINGAN KORUPSI PADA PEMERINTAH DESA (Studi Kasus Korupsi Dd Dan Add Tahun 2014-2015 Desa Semare)

Tara Tania¹, Miranda², Roberto A G. Sianturi³, Ashwa Afriyani⁴, Intan Nurina Seftiniara⁵

taniatara656@gmail.com¹, miranda.anlr23@gmail.com², robertosianturi785@gmail.com³,
afriyaniashwa548@gmail.com⁴

Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Kasus korupsi tidak dilakukan sendiri melainkan terbentuk jaringan di dalamnya. Interaksi sosial akan membentuk sebuah jaringan sosial yang intens, dimana antara individu saling memiliki ikatan kuat terutama ikatan kekeluargaan. Masalah korupsi bukan hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, melainkan sudah masuk ke sektor pemerintahan desa. Kasus korupsi DD dan ADD yang terjadi di sebuah desa di Jawa Timur memiliki latar belakang dan hubungan antara aktor yang luput untuk diamati, kenapa sebuah jaringan itu sangat kuat terutama korupsi yang telah membentuk sebuah jaringan tersendiri. Hubungan yang dominan pada kasus ini yaitu hubungan keluarga, profesi yang sama dari jaringan keagamaan dan tim sukses kepala desa. Pola kepemimpinan kepala desa akan menjadi sorotan dalam menjalankan roda pemerintahannya karena kekuasaan yang dominan sehingga mendorong terjadinya korupsi.

Kata Kunci: Jaringan Sosial, Korupsi, Hubungan Antaraktor, Kekuasaan.

PENDAHULUAN

Pelaku korupsi pada saat sekarang sangat cerdik dalam menjalankan aksinya, yaitu dengan membentuk sebuah jaringan. Aksinya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan rekan-rekan yang telah dipercaya sebelumnya. Maka dengan terbentuknya jaringan korupsi, tentunya akan mempersulit proses penyelidikan yang dilakukan pihak berwajib untuk menemukan dan menentukan aktoraktor yang terlibat, dan seberapa jauh peran dari setiap aktor dalam jaringan korupsi. Terbentuknya jaringan korupsi bukanlah fenomena yang baru, dimana selama ini kasus korupsi selalu tidak dilakukan oleh satu atau dua aktor saja melainkan melibatkan banyak orang bahkan sekelompok orang dalam satu organisasi tertentu.¹

Korupsi diidentifikasi sebagai kejahatan yang bersifat laten yang berpotensi untuk merugikan dan membahayakan negara, sebagaimana tindak pidana lainnya yang identik dengan ancaman terhadap penegakan hukum keadilan dan ke-manusiaan (Syamsudidn, 2001). Aktor korupsi biasanya tidak sendiri dalam menjalankan aksinya, dengan melakukan korupsi bersama-sama akan terjadi indikasi saling menyandera satu sama lain dan kemudian saling melindungi antaraktor dalam struktur kelembagaan. Bahkan patut ditelisik, perilaku korupsi secara bersama-sama akan membentuk sebuah jaringan korupsi dalam sebuah lembaga atau instansi.

Jaringan tersebut akan menghubungkan antara aktor satu dengan aktor lainnya dengan berbagai peran yang berbeda-beda. Jaringan bisa terbentuk atas sebuah ikatan, mulai dari ikatan sosial kekeluargaan, pertemanan dan kolega bahkan bisa faktor lain di luar itu, yang penting saling memberikan keuntungan satu sama lain antaraktor yang terlibat korupsi. Melihat cara jaringan korupsi tersebut terbentuk, perlu mengamati lebih jauh mengenai struktur sosial antaraktor. Namun, dapat dilihat dari struktur kelembagaannya apakah ada keterkaitan garis kekeluargaan antaraktor atau jaringan kolega yang masuk dalam

¹ Rahman, F., Baidhowi, A., & Sembiring, R. A. (2018). Pola jaringan korupsi di tingkat pemerintah desa (Studi kasus korupsi DD dan ADD tahun 2014-2015 di Jawa Timur). *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 29-56.

kelembagaan secara alamiah hingga terbentuknya nepotisme.²

Korupsi menjadi kejahatan struktural bukan karena adanya struktur (sistem) sosial yang mengamini, melainkan karena adanya hubungan dualitas (timbang balik) antara struktur dan agen, yang kemudian terikat dan menjerat satu sama lain. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana adanya indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal. Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa. Munculnya Dana Desa (DD) menjadi bahan 'empuk' para pemburu rente untuk mengais kekayaan negara. Dengan minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa membuat aliran DD semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa.

Kasus korupsi DD yang menjadi sorotan penulis adalah kasus korupsi yang terjadi di Desa Klebun Semar Paravan¹. Kasus korupsi tersebut melilit Sekretaris Klebun Semar MAI yang ditangkap akibat kasus penyalahgunaan DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 2014-2015. Ia dikenakan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Modus pelaku adalah melalui penganggaran kegiatan fiktif. Seperti pengadaan alat pengeras suara, kegiatan tasyakuran, hingga sejumlah pembangunan di Klebun Semar Paravan, salah satunya, pembangunan drainase yang diduga di-mark up. Selain itu, ada beberapa pemalsuan kwitansi pembelian barang dan jasa.

Korupsi yang dilakukan memang terbilang kecil, kerugian negara mencapai Rp 87 juta berdasarkan penghitungan Inspektorat Kabupaten Paravan² terhadap LPJ Klebun Semar Tahun 2014-2015. Meski dana yang dikorupsi kecil, lantas tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apabila korupsi dibiarkan, akan merusak tatanan sosial dan mengganggu proses pembangunan daerah. Pada penanganan kasus korupsi ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Paravan mengindikasikan adanya keterlibatan orang lain dalam kasus dugaan korupsi DD dan ADD di Klebun Semar Paravan. Masalah timbulnya korupsi di Klebun Semar bisa dilihat dari pola kepemimpinan kepala desa tersebut dan bagaimana menjalankan roda kepemimpinan sehingga terjadinya korupsi di dalam struktur lembaganya.

Selain itu, struktur organisasi pemerintahan desa juga dapat dianalisis, apakah ada keterikatan hubungan kekeluargaan atau pertemanan antaraktor dalam struktur lembaga yang mengarah pada terjalannya jaringan korupsi. Fokus jaringan sosial yang melatarbelakangi adanya dorongan perilaku korupsi dalam tataran pemerintah desa membuat peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait jaringan korupsi yang terjal di Klebun Semar dengan berbagai permasalahan. Maka, peneliti mengkaji secara mendalam tentang Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus: studi kasus korupsi Dd dan Add Tahun 2014-2015 Desa Semare).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Penelitian studi kasus sangat pas karena dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, analisis isi terhadap struktur sosial dalam organisasi pemerintahan

² Marta, R. F. (2019). Konsolidasi Gerakan Anti Korupsi Berbasis Akademisi Melalui Jurnal Integritas Dan ACS 2018. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 3(1).

Semare. Kedua, menganalisis aspek latar belakang hubungan (jaringan) antaraktor yang terlibat kasus korupsi. Metode penelitian ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung analisa dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jaringan Sosial

Hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat saat ini semakin kompleks dengan intensifnya interaksi sosial dari berbagai dimensi mulai dari hubungan sosial, budaya, ekonomi, agama, politik dan lain sebagainya merupakan sebuah realitas sosial pada era modernisasi saat ini. Mulai dari membentuk sebuah jaringan, berinteraksi, beradaptasi menjadikan jaringan sosial sebagai salah satu mode bagaimana masyarakat melakukan hubungan individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya. Menurut jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, dimana ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik yang lain dalam jaringan adalah hubungan sosial.

Menurut Robert M. Z Lawang dalam Damsar, mengemukakan pengertian jaringan merupakan gabungan dari kata net dan work. Net diartikan sebagai jaring sedangkan work berarti kerja. Gabungan kata network, yang lebih menekankan pada kerja bukan jaringan, dimengerti sebagai kerja (bekerja) karena dalam hubungan antar simpul-simpul itu seperti halnya jaring (net). Jaringan itu diumpamakan seperti jaring laba-laba yang saling mengikat antara simpul satu dengan simpul lainnya.

Pada studi jaringan sosial melihat sebuah hubungan antara individu yang memiliki makna lebih subyektif dimana hubungan tersebut dikaitkan dengan sesuatu sebagai simpul atau ikatan. Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas, jaringan sosial merupakan ikatan khusus yang ada dalam diri individu atau kelompok didukung dengan adanya interaksi sosial di dalamnya, interaksi sosial tersebut akan membentuk hubungan-hubungan baru yang memiliki simpul atau karakter tersendiri dengan norma sebagai batasannya. Dengan didukung rasa kepercayaan yang tinggi dalam ikatan, akan membentuk sebuah jaringan sosial yang kokoh.

Untuk melihat aktivitas individu atau kelompok menjadi sebuah aksi sosial maka teori jaringan sosial sangat berperan terhadap sistem sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Wellman, dalam men gurai fokus teori jaringan tersebut, cara yang paling mudah mempelajari suatu struktur sosial adalah dengan menganalisis pola ikatan-ikatan yang menghubungkan para anggota. Para analisis jaringan mencari struktur-struktur yang berada dalam pola jaringan yang teratur berada di bawah permukaan sistem sosial yang kompleks. Aspek yang khas dari teori jaringan ialah berfokus kepada deretan luas struktur mikro hingga makro, bagi teori jaringan para aktor mungkin adalah orang-orang, tetapi mereka juga adalah kelompok-kelompok, korporasi-korporasi dan masyarakat.

Mark Granoveter melukiskan hubungan pada level mikro seperti tindakan yang melekat di dalam hubungan pribadi konkret dalam struktur (jaringan sosial) terhadap hubungan itu. Dari hubungan itu, setiap aktor (individual atau kolektif) mempunyai akses yang berbeda kepada sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Terbentuknya jaringan korupsi tidak lepas dari interaksi sosial yang terjalin antara aktor satu dengan aktor lainnya, guna mempermudah koordinasi dalam jaringan. Kemudahan koordinasi dan interaksi yang cepat direspons, apabila antaraktor sudah memiliki keterikatan (hubungan) tertentu yang memungkinkan mereka untuk tidak terlalu lama dalam menentukan tujuan demi memperoleh kepentingan pribadi.

Sedangkan sistem yang terbentuk dalam jaringan tidak lagi statis, melainkan akan lebih condong ke arah dinamis, karena dilandaskan kepentingan pribadi dan tercapainya kepentingan golongan dalam jaringan. Koneksi antaraktor akan semakin tumbuh sesuai

dengan kebutuhan mereka sendiri, keinginan, pengaruh atau tuntutan dari dalam jaringan. Bentuk jaringan korupsi yang terencana terlihat cukup menarik perhatian, melihat dari ruang lingkupnya tindakan korupsi ini bisa berhubungan dengan tujuan politis.³

2. Jenis Jaringan Korupsi

Berdasarkan beberapa kajian, terdapat beberapa jenis model jaringan korupsi lapis tiga, yaitu ;⁴

- a. Korupsi lapis pertama, hal ini biasanya berupa suap (bribery) yang diprakarsai pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrasi atau petugas pelayanan publik. Selain itu korupsi pada lapis pertama bisa juga berupa pemerasan (extortion) yang terprakarsa untuk meminta 'balas jasa'-nya datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya.
- b. Korupsi lapis kedua, berupa jejaring korupsi (cabal) antara birokrat, politisi, aparat penegak hukum dan perusahaan yang nepotistik di antara beberapa anggota jejaring korupsi, yang dapat berlingkup nasional.
- c. Korupsi lapis ketiga, berupa jejaring korupsi (cabal) berlingkup internasional. Dalam model ini, kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga pengutang dan atau lembaga-lembaga internasional yang punya otoritas di bidang usaha maskapaimaskapai mancanegara, yang produknya terpilih oleh pimpinan rezim yang menjadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut.

Terbentuknya jaringan korupsi tidak lepas dari interaksi sosial yang terjalin antara aktor satu dengan aktor lainnya, guna mempermudah koordinasi dalam jaringan. Kemudahan koordinasi dan interaksi yang cepat direspons, apabila antaraktor sudah memiliki keterikatan (hubungan) tertentu yang memungkinkan mereka untuk tidak terlalu lama dalam menentukan tujuan demi memperoleh kepentingan pribadi. Setiap aktor pasti memiliki hubungan dengan aktor lainnya di dalam jaringan, yang kemudian akan membentuk sub-sub jaringan yang lebih kompleks.

3. Pola Jaringan Korupsi di Pemerintah Desa Semare.

Penggunaan pendekatan jaringan sosial dalam menjelaskan tindakan korupsi ini berkaitan dengan tindakan perilaku korupsi sebagai bentuk sebuah hubungan yang bersifat formal dan tertutup. Hubungan ini dilakukan orang-orang yang bekerja sama dalam melakukan tindak kejahatan dengan upaya menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Kerja sama ini dimungkinkan terjadi karena adanya dukungan dari dalam jaringan yang memiliki hubungan antaraktor, yaitu hubungan informal yang dapat terbentuk karena adanya faktor hubungan ke dekatan di masa lalu. Terbentuknya sebuah jaringan korupsi akan mempermudah berlangsungnya tindakan korupsi.

Penggunaan pendekatan jaringan sosial, dengan harapan akan dapat menunjukkan salah satu hal yang mendasar, terkait timbulnya perbuatan korupsi, yaitu soal interaksi sosial antara individu dalam melakukan sebuah perbuatan kriminal yang didukung dengan adanya kesempatan. Interaksi sosial akan semakin kuat terjalin antaraktor apabila didukung juga dengan adanya hubungan yang telah terbentuk jauh sebelumnya. Hubungan-hubungan tersebut bisa terbentuk dari adanya ikatan buhungan keluarga, latar belakang profesi yang

³ Huriyati, I. M., & Huriyati, K. (2024). Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Nagari dalam Pengelolaan Dana Desa Nagari Jambak Kabupaten Pasaman. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2493-2503.

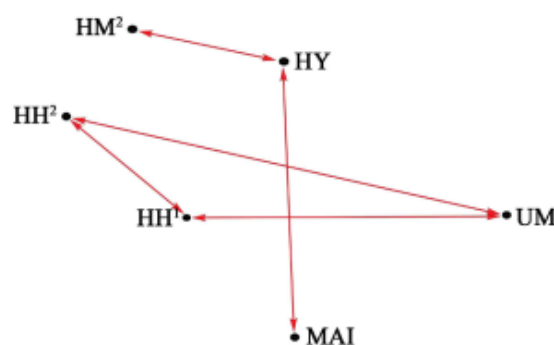
⁴ Capri, W., Cahyati, D. D., Hasanah, M., Prasongko, D., & Prasetyo, W. (2021). Kajian korupsi sebagai proses sosial: Melacak korupsi di sektor sumber daya alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 121-142.

sama, bahkan interaksi biasa yang hanya menghasilkan hubungan pertemanan.⁵

Terbentuknya pola jaringan korupsi dalam pemerintah Klebun Semar Paravan bisa dianalisis melalui struktur kelembagaan pemerintahan. Di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan terdapat empat hubungan dari masing-masing aktor dalam jaringan sosial korupsi, yang terdiri dari tiga hubungan khusus atau istimewa dan satu hubungan tidak istimewa. Tiga hubungan khusus yaitu, pertama di dominasi hubungan profesi yang sama dari jaringan keagamaan, kedua hubungan tim sukses dan yang keempat dari latar belakang hubungan keluarga, sementara hubungan tidak istimewa, yaitu hubungan pertemanan biasa. Masing-masing hubungan tersebut menghasilkan fakta bahwa hampir semua orang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain, baik yang ada di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan maupun di luar struktur itu sendiri.

Pola jaringan sosial korupsi yang ada di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan, digambarkan sesuai dengan prinsip jejaring sosial antaraktor guna mengetahui hubungan tertentu masing-masing aktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Jaringan sosial dengan lingkup terkecil yang digambarkan dari prinsip-prinsip jaringan sosial merupakan analisis dari struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan dengan mempertimbangkan adanya pengaruh orang atau hubungan tertentu dari eksternal struktur pemerintahan desa.⁶

Di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar tidak luput dari adanya hubungan simetris yang ditekankan hanya kepada hubungan keluarga yang memiliki ikatan darah dan dia menduduki jabatan di pemerintahan Klebu Semar. Upaya memasukkannya salah satu anggota keluarga di dalam struktur pemerintahan desa ternyata mampu memberikan pengaruh tersendiri dalam roda pemerintahan yang dijalankan. Semakin strategis posisi yang ditempati, maka akan semakin mudah mengendalikan jalannya roda pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi akan memberikan berbagai macam kesan tertentu baik itu kesan negatif ataupun positif dari berbagai kalangan. Dengan masuknya salah satu keluarga dalam struktur pemerintahan, faktanya akan lebih mendorong kepada proses terbentuknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meskipun strukturasi kekeluargaan itu terbentuk dalam struktur pemerintahan selingkup desa. Pada kenyataannya strukturasi pemerintahan desa yang berbasis kekeluargaan pada mayoritas desa di Indonesia, tidak luput dari kuatnya politik lokal di masing-masing desa.



Pada diagram di atas dapat diamati, dimana terdapat jaringan hubungan keluarga di dalam struktur organisasi pemerintahan Klebun Semar Paravan dan di sisi lain ada aktor di luar struktur pemerintahan desa Semare Paravan yang memiliki hubungan simetris dengan

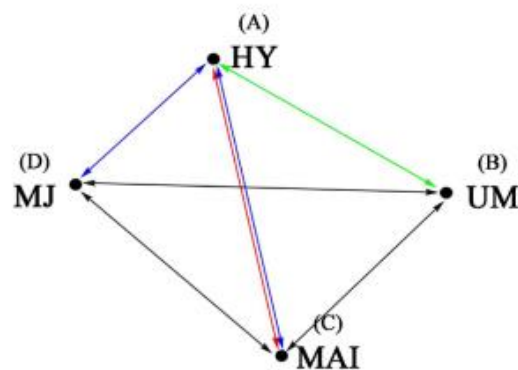
⁵ Herdiana, D. The Tendency Of Corruptive Behavior Of Village Head In The Village Development. *Matra Pembaruan*, 3(1), 1-11.

⁶ Sasongko, A. B., & Sulhin, I. (2022). DEFISIT MODAL SOSIAL DAN KORUPSI DANA DESA: MERITOKRASI CALON KEPALA DESA. *Journal of Mandalika Literature*, 3(4), 213-228.

aktor yang berada di dalam struktur sebagai penguat atau orang-orang yang memiliki pengaruh lebih, meski mereka bertindak di luar struktur pemerintahan Semare.⁷

Untuk menganalisis hubungan masing-masing aktor hingga terbentuk jaringan sosial korupsi, harus menganalisis dan memahami keseluruhan struktur organisasi perangkat Semare. Bagian ini menekankan pembahasan terkait aktor mana saja yang memiliki jabatan strategis di dalam struktu pemerintahan Semare agar pemetaan terhadap struktur pertama lebih jelas ikatan hubungan antaraktor. Selain itu, mencari tahu aktor mana yang memiliki kekuatan paling besar, baik di dalam jaringan ataupun di luar jaringan, yang mendorong serta mampu menjadi tameng timbulnya korupsi sampai terbentuknya sebuah jaringan yang terstruktur dan masif di dalam struktur pemerintahan desa semare.⁸

Dari hubungan sosial yang masuk dalam struktur pemerintahan Semare akan menghasilkan jaringan yang tidak acak. Meski jaringan yang terjalin tidak terbentuk secara acak, melainkan mereka tetap memiliki hubungan yang begitu kuat antara aktor yang satu dengan aktor yang lainnya. Seperti jaringan tidak acak yang terbentuk dan digambarkan dalam diagram di bawah ini. Terdapat empat aktor yang memiliki hubungan silang satu sama lain yang mengakibatkan jaringan tidak acak.



Meski jaringan ini membentuk hubungan yang saling silang, tidak juga mengubah struktur mereka yang tidak acak karena meski (A) HY, (B) UM, (C) MAI dan (D) MJ saling memiliki hubungan yang silang antaraktor, tetap saja mereka saling memiliki hubungan satu sama lain dan ikatan yang kuat di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan.

KESIMPULAN

Jaringan sosial korupsi yang terbentuk dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan didominasi tiga hubungan kekuatan besar, yaitu hubungan keluarga, hubungan profesi yang sama dari jaringan keagamaan dan hubungan tim sukses. Dari ketiga hubungan yang dominan tersebut, ada juga beberapa kelompok kecil yang mulai tersingkirkan dari dalam jaringan karena kurang memiliki kontribusi dan dikhawatirkan akan melemahkan kekuatan jaringan tersebut. Terdapatnya hubungan simetris dan asimetris di pemerintahan desa tidak lepas dari kentalnya politik lokal, yang memang pada dasarnya membentuk sebuah kroni yang berujung kepada nepotisme. Masuknya orang-orang terdekat dan kepercayaan seorang kepala desa berguna mempertahankan kekuasaan dan mencegah perlawanan politik. Proses interaksi dalam jaringan sosial mampu mendorong terciptanya perilaku korupsi, yang bisa terjadi di dalam struktur sosial masyarakat, organisasi atau instansi lainnya.

⁷ Narti, S., & Octaviani, V. (2019, June). Model Jaringan Komunikasi Berantas Korupsi. In *Seminar Ilmu-Ilmu Sosial* (pp. 37-48).

⁸ Dwiyanto, D., & Darmosoetopo, R. (2014). Kontinuitas dan diskontinuitas perilaku korupsi di Jawa. *Berkala Arkeologi Vol. 34 No. 1, Mei 2014*, 34(1), 97-114.

Fungsi sebuah jaringan akan mengikat satu sama lain, sama halnya dengan jaringan korupsi yang terbentuk. Mereka akan saling menggigit dan mencengkram siapapun yang menurut mereka terlibat dalam jaringan yang terbentuk. Disayangkan lagi dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan yang didominasi kalangan pemuka agama setingkat ustad tidak mampu membentengi diri mereka dari pusaran korupsi yang terjadi dalam lingkungan sosial mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Capri, W., Cahyati, D. D., Hasanah, M., Prasongko, D., & Prasetyo, W. (2021). Kajian korupsi sebagai proses sosial: Melacak korupsi di sektor sumber daya alam di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 121-142.
- Dwiyanto, D., & Darmosoetopo, R. (2014). Kontinuitas dan diskontinuitas perilaku korupsi di Jawa. *Berkala Arkeologi* Vol. 34 No. 1, Mei 2014, 34(1), 97-114.
- Herdiana, D. The Tendency Of Corruptive Behavior Of Village Head In The Village Development. *Matra Pembaruan*, 3(1), 1-11.
- Huriyati, I. M., & Huriyati, K. (2024). Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Nagari dalam Pengelolaan Dana Desa Nagari Jambak Kabupaten Pasaman. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 2493-2503.
- Marta, R. F. (2019). Konsolidasi Gerakan Anti Korupsi Berbasis Akademisi Melalui Jurnal Integritas Dan ACS 2018. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 3(1).
- Narti, S., & Octaviani, V. (2019, June). Model Jaringan Komunikasi Berantas Korupsi. In *Seminar Ilmu-Ilmu Sosial* (pp. 37-48).
- Rahman, F., Baidhowi, A., & Sembiring, R. A. (2018). Pola jaringan korupsi di tingkat pemerintah desa (Studi kasus korupsi DD dan ADD tahun 2014-2015 di Jawa Timur). *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 29-56.
- Sasongko, A. B., & Sulhin, I. (2022). DEFISIT MODAL SOSIAL DAN KORUPSI DANA DESA: MERITOKRASI CALON KEPALA DESA. *Journal of Mandalika Literature*, 3(4), 213-228.